

IDENTITAS INDONESIA DALAM TELEVISI, FILM DAN MUSIK

Editor

Dr. Heri Budianto, S.Sos., M.Si.

Dr. Leila Mona Ganiem, M.Si.

Dewi Sad Tanti, S.Sos., M.Si.



**IDENTITAS INDONESIA
DALAM TELEVISI, FILM DAN MUSIK**



KOMUNIKASI INTERNASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL: INDONESIA DALAM KANCAH GLOBAL



Setio Budi H.H.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail: setiohh@yahoo.com



ABSTRAK

Posisi Indonesia di kancah global cukup rentan. Kerentanan tersebut terutama karena faktor ekonomi politik, yaitu penguasaan asing atas sumber-sumber strategis Indonesia, kemudian dari sisi kekuatan militer dan aspek budaya. Termasuk didalam hal tersebut adalah potensi konflik dalam skala lokal/regional dan global. Diperlukan suatu sistem komunikasi internasional yang terintegrasi dan berdasar kepentingan nasional Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat.

Kata kunci : komunikasi internasional, ketahanan nasional, potensi ancaman dan integrasi strategi

Pendahuluan

Posisi strategis secara geopolitik, ekonomi dan militer merupakan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Selain mengembangkan seluruh aspek komponen bangsa lengkap dengan segala potensinya, aspek *positioning* Indonesia di kancah Internasional perlu untuk dikembangkan dan dimantapkan secara kuat. Pentingnya posisi Indonesia yang kuat di dunia internasional merupakan bagian dari pengembangan strategis dan komprehensif kepentingan nasional, yang pada akhirnya untuk memperkuat aspek identitas kebangsaan, kesejahteraan dan pemantapan kekuatan baik secara politik, ekonomi dan militer.

Dalam khasanah filosofi-perang, Sun Tzu mengajarkan tentang pentingnya pengendalian informasi dalam situasi perang, dengan tujuan memenangkan peperangan tanpa pertempuran yang menimbulkan korban besar. Melihat berbagai dinamika ekonomi, sosial, politik, budaya dan hankam saat ini, upaya menyiapkan aspek ketahanan nasional dari berbagai lini sudah saatnya kembali diperkuat dan tidak hanya didefinisikan hanya tugas pemerintah, namun seluruh komponen bangsa.

Secara internasional, posisi Indonesia berada dalam "ancaman" baik secara politik, ekonomi, budaya dan militer, seperti pakta pertahanan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Anzac (Australia dan Selandia Baru), kemudian RRC, Jepang, Korea Selatan di Utara, India di sebelah barat, demikian pula penempatan pangkalan militer Amerika di Darwin, adalah fenomena yang tidak bisa dianggap sepele/ tidak membahayakan. Negara-negara tersebut pasti memiliki kepentingan ekonomi politik dan militer untuk mendominasi baik dalam arti kepentingan perebutan sumber daya maupun potensi pasar yang besar di Indonesia

Kebijakan politik bebas aktif memang secara diplomatis melihat positif tiap hubungan antar negara dan berbagai dinamika Internasional yang ada, meskipun tetap perlu kewaspadaan dan kekritisan, Secara diplomatis tidak ada kehendak bagi bangsa Indonesia untuk berposisi kembali sebagai jaman Soekarno, dengan berbagai jargon-jargon dan ideologi politiknya dan aliansi politik antar bangsa yang dibuat – sebagai sebuah posisi Indonesia di kancah Internasional. Politik luar negeri Indonesia sejak jaman orde baru sampai saat ini nampak lebih soft dan akomodatif. Dalam perkembangan politik dua dasa warsa terakhir ini, terutama sejak Uni Soviet runtuh dan barat menjadi lebih dominative, perkembangan ekonomi politik dan militer dunia mengalami perubahan dan gerakan yang signifikan, mulai dari aliansi untuk menduduki Irak, kemudian Afganistan. Selanjutnya berbagai dinamika yang sering disebut sebagai "Arab Spring" dan tiga isu yang masih mendominasi pemberitaan internasional, yaitu Iran, Suriah dan Korea Utara adalah persoalan yang perlu untuk dicermati.

Secara mendasar pada akhirnya bagi Indonesia adalah bagaimana mengembangkan kekritisan atas potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Menyadari bahwa negara lain memiliki kepentingan untuk menguasai/ menundukkan Indonesia dalam berbagai lini. Pemikiran ini perlu juga dibalik dengan Indonesia memiliki kepentingan untuk memiliki pengaruh kuat terhadap bangsa lain, sebagai bagian dari keamanan nasional Indonesia itu sendiri, untuk itu langkah strategis perlu dilakukan. Termasuk pemikiran ulang paradigma pertahanan nasional dari murni defensif ke pre-emptive (strike), sebagaimana beberapa negara, termasuk kebijakan pertahanan yang dikembangkan Australia yang digagas sejak jaman perdana menteri Howard.

Sistem komunikasi dan informasi secara makro maupun mikro perlu dikembangkan *platform*-nya secara mendasar, terutama pada landasan kepentingan nasional yang sama. Ini dibedakan dengan sistem komunikasi authoritarian, ada beberapa hal yang harus disepakati supaya misalnya media massa, media sosial dan berbagai infrastruktur informasi dan komunikasi tidak justru melemahkan spirit nasionalisme dan aspek ketahanan nasional, atas nama kebebasan komunikasi. Kekritisan, kapasitas, sistem dan skill seluruh lini komponen bangsa perlu diperkuat, agar tidak menjadi alat bagi kepentingan global.

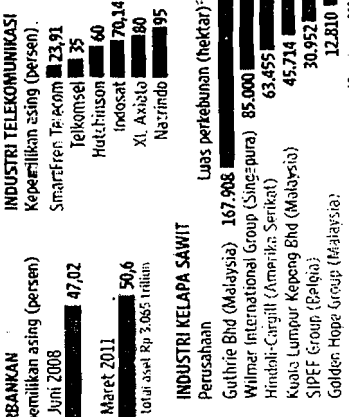
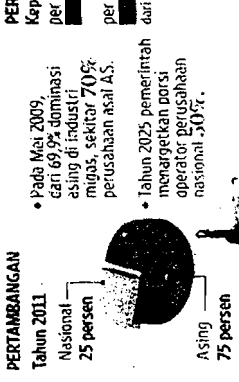
Disinilah konsep komunikasi internasional Indonesia perlu dikembangkan. Sementara di dalam negeri, berbagai potensi, kapasitas yang dimiliki dari berbagai lini dan matra perlu dikembangkan sebagai bagian komprehensif dari strategi komunikasi Indonesia.

Posisi Indonesia, Aspek Kerentanan dan Ketahanan Nasional

Memulai (lagi) membahas posisi Indonesia dan dalam konteks global, pada gambar dibawah ini, ditunjukkan aspek ekonomi dan aspek penguasaan sumber daya yang dikuasai oleh asing, tersebut dibawah ini :

Gambar 1 Penguasaan Asing atas 4 Sektor Industri

Kepemilikan Asing di Indonesia



Sumber: Laporan Resmi, dan data yang tidak terdapat pada laporan resmi, dan data yang tidak terdapat pada laporan resmi, dan data yang tidak terdapat pada laporan resmi.

Sumber Kompas, 23 Mei 2011

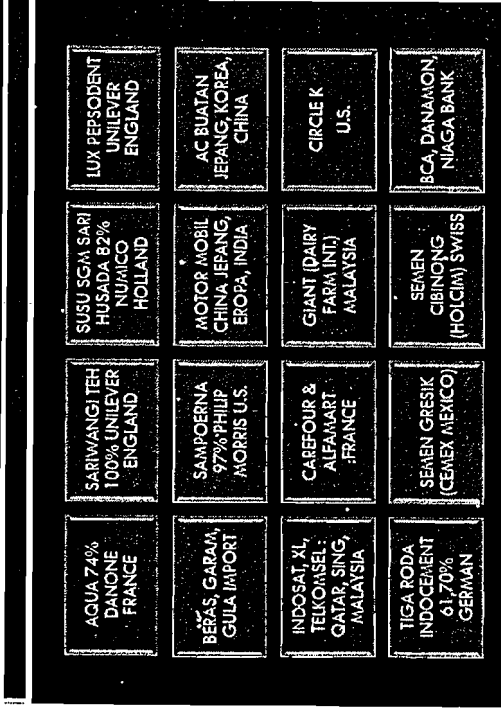
Kompas menggambarkan 4 sektor strategis yang dikuasai asing, yaitu pertambangan (75%), sektor perbankan (50.6), industri telekomunikasi (23,91 - 95% / perusahaan) dan industri kelapa sawit (405.839 hektar). Paparan tersebut tentu memprihatinkan, dalam konteks ekonomi politik, kapitalisasi industri tersebut tentu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan sampai regulasi yang ada untuk memastikan bisnis mereka di Indonesia.

Secara riil dilapangan, berbagai perusahaan dan industri juga ada dalam fenomena penguasaan asing, sebagaimana pada gambar 2 dibawah.

Oleh Rahakundini Bakrie, diajukan pertanyaan apa yang berjalan salah ? di negeri ini, ketika satu persatu berbagai perusahaan dan industri menjadi milik asing, secara sistematis. Disebut secara sistematis terutama karena ada relevansinya dengan berbagai perubahan dan adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung fenomena tersebut, selain juga aspek perilaku pemilik yang dengan mudah melepas saham karena faktor harga/ pertimbangan pribadi yang lain. Paparan diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ada dalam kepungutan asing, bahkan sampai ke tingkat konsumsi/ kebutuhan sehari-hari menjadi

dipasok oleh asing.

**Bagan 2 Penguasaan Asing atas Berbagai Perusahaan di Indonesia
APA YANG BERJALAN SALAH?**



Sumber : Bahan Presentasi Rahakundini Bakrie, 2012, dalam Seminar dan Konferensi "Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional", UPN Veteran Yogyakarta, 14 Juni 2012

Posisi ini tentu dalam konteks ekonomi politik dan militer ada dalam posisi yang membahayakan. Berbahaya karena situasi yang terjadi tidak hanya pada aspek bisnis-hari, namun juga pada kepentingan ekonomi politik secara luas. Terutama karena aspek kapital yang besar memiliki signifikansi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan-peraturan yang menguntungkan tidak hanya pada aspek bisnis/industri saja, namun diyakini sampai pada aspek ekonomi politik dan militer secara makro. Termasuk yang harus dikritisi dan diwaspadai adalah potensi eksploitasi konsumen. Domain kepentingan yang berjalan antara yang bersifat "soft" (ekonomi, budaya, politik) dan "hard", berupa kekuatan militer dan kewilayahan, akan terus berjalan sebagaimana dinamika global sampai saat ini.

Berbagai pengalaman/kasus yang dialami Indonesia, seperti lepasnya Timor Timur, Simpadan-Ligitan, kemudian Ambalat, berbagai konflik perbatasan dan perang dagang adalah fenomena yang tidak hanya bisa didekati dengan aspek diplomasi murni, namun juga perlu dukungan penuh secara riil maupun simbolisme kekuatan militer. Tentu saja termasuk didalamnya adalah aspek kepemimpinan yang kuat. Sebagaimana berbagai kasus dan pengalaman di Indonesia selama ini yang sering terkesan kurang koordinasi, menghadapi hal-hal seperti tersebut diatas memerlukan konsep dan tindakan yang terintegrasi,

Tabel 1. Skenario Konflik Indonesia dan Kawasan

ASEAN	INDONESIA, AUSTRALIA dan PORTUGAL/TIMOR TIMUR
<ul style="list-style-type: none"> • Singapore is angered by increased traffic through Malaysia's new international airport that is taking tourist and airport revenues away from Singapore. • Malaysia threatens to shut off water to Singapore. • Singapore plans military action to secure its water supply. • Singapore gains global Chinese sympathy and China volunteers aid. • Indonesia (a haven for anti-Chinese sentiment), in return for at least one of the disputed islands with Malaysia (see above), offers military support. • Brunei says it will also support Malaysia. • All boycott Singapore imports and block exports to Singapore. • All economies begin to suffer. • China begins aiding Singapore militarily and with oil. • Mideast nation-states, to include the OPEC members, support Malaysia. • Chinese businessmen develop a covert plan to destabilize the economies and governments of Malaysia, Indonesia, Brunei, and other nation-states who support Malaysia (Note: In information warfare, anyone can be a player as the battlefield is global because networks have global access). • Each side begins information warfare attacks to include misinformation via Internet, Web sites, viruses, and denial-of-service attacks. • Australia and New Zealand also side with Singapore (based on their dislike for Indonesia due to East Timor). • Other ASEAN nation-states supported by the United States get warring parties to agree to a cease-fire and further talks under the auspices of the UN. • UN troops are sent to Malaysia and Singapore as peacekeepers. 	<p><i>In fact, through the "underground hacker global communication system," some hackers had called on all the hackers around the world to attack the web sites and systems of the Indonesian government. The attacks were carried out by hackers in Portugal, the United States, Australia, and it is assumed by others in Europe and Asia. The actual scenario went something like this:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In 1979, Portugal leaves East Timor • Indonesia annexes East Timor • Nation-states object • The issue goes before the UN • The UN does not recognize the Indonesian claim • As high technology progresses, Indonesian Web sites and systems are attacked • A "call to arms" goes out to global hackers to attack the Indonesian systems en masse • Estimated that between 24 and 47 Indonesian Web sites and systems go offline in one day • After more than 20 years, East Timor is set free

Jones, Kovacich dan Luzwick (2002: 206,208)

Integrasi Strategi Komunikasi Internasional

Integrasi strategi dan eksekusi adalah pertanyaan penting yang harus dimiliki oleh Indonesia. Pada sisi diplomasi, tentu Departemen Luar Negeri

memainkan peranan penting dalam konteks tersebut, yaitu membangun dan mengembangkan konsep dan eksekusi komunikasi internasional yang strategis. Diplomasi yang dilakukan tentu harus menjadi bagian dari perwujudan kepentingan nasional Indonesia secara utuh. Dalam konteks ini mengembangkan konsep komunikasi internasional yang komprehensif menjadi isu penting.

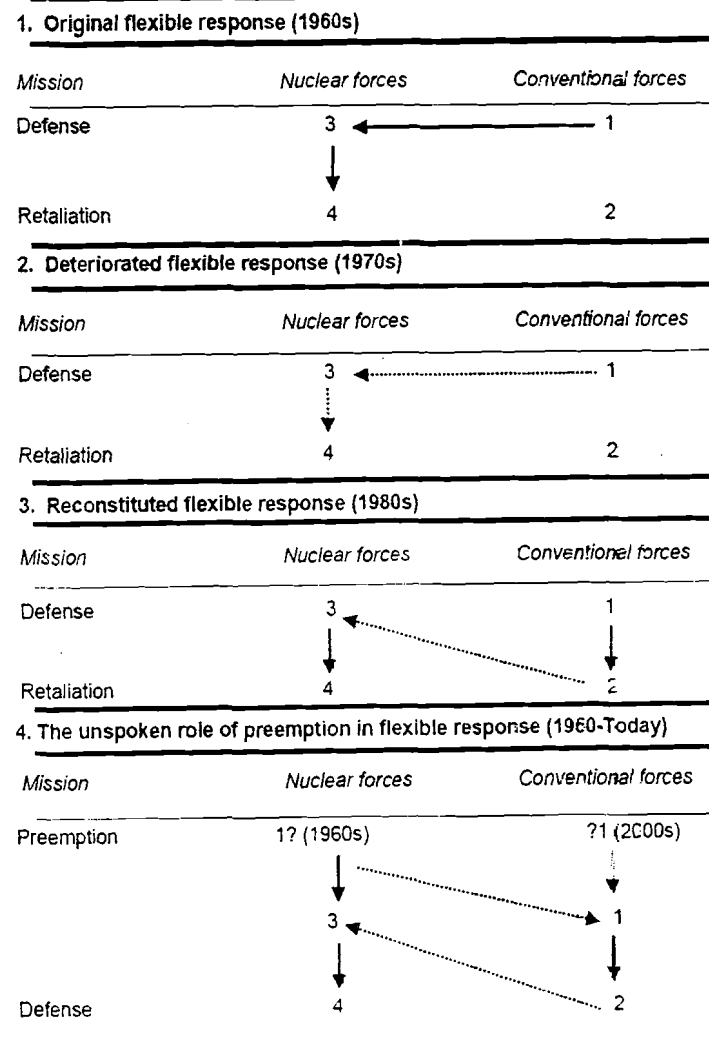
Melissen (dalam Zaharna, 2009: 83) memaparkan tentang diplomasi baru, yaitu bahwa diplomasi publik baru tidak hanya berurusan dengan pesan, kampanye promosi, atau kontak langsung pemerintah dengan pihak luar negeri – berkaitan dengan kebijakan, namun lebih dari itu diplomasi baru menyangkut relasi-relasi (relationship) dengan aktor-aktor masyarakat madani (civil society) di Negara lain dan juga tentang fasilitasi jejaring antara pihak-pihak non pemerintah didalam negeri dan luar negeri. Paparan ini Nampak menarik jika kita melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh Negara-negara Barat kepada Indonesia khususnya dan Negara berkembang lain pada umumnya, dimana Amerika/ Negara-negara Eropa melakukan diplomasi langsung, baik secara ekonomi, politik, budaya dan militer, namun juga melakukan fasilitasi dengan berbagai lembaga seperti perguruan tinggi, LSM dan berbagai organisasi non pemerintah yang lain. Isu yang dimainkan antara lain demokratisasi, anti korupsi, terorisme, pendidikan, lingkungan.

Menjadi sangat jelas dan relevan bagaimana Indonesia sebagai bangsa besar bagi sebagian kalangan akademisi maupun politisi adalah bangsa yang kecil, lemah dan terhegemoni, dari aspek ekonomi, budaya, politik dan militer. Bahkan didalam negeri sendiri, pertarungan opini yang terjadi atas berbagai isu menjadi penting untuk dicermati, yaitu apakah itu murni bagian dari dinamika masyarakat dan bangsa, atau justru adalah bagian dari permainan, "softwar" yang dimainkan oleh tangan-tangan asing – dan kita bahkan mungkin tidak menyadarinya.

Tomes (2007 : 47) menunjukkan suatu bagan yang menggambarkan, bagaimana Amerika melakukan respon atas berbagai dinamika global, yang berkaitan dengan kepentingan mereka, yaitu aspek dominasi global. Bagan ini oleh Tomes digambarkan sebagai gambaran bagaimana Amerika melakukan respon dari perang Vietnam sampai perang Irak, dan menunjukkan pilihan-pilihan atas apa yang harus dilakukan dalam konteks melakukan peperangan, sebagaimana gambar 4.

Selalu ada dua kemungkinan dalam melakukan respon, yaitu menunggu suatu peristiwa dan melakukan pembalasan serta melakukan "preemptive strike". Yang menjadi menarik adalah kebijakan melakukan serangan pendahuluan (preemptive) menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih jauh, terutama dalam konteks kepentingan ekonomi politik dan atau isu-isu global yang bisa dijadikan alasan serangan awal tersebut.

Gambar 4 Kategori Respons Pertahanan Amerika



Bagi Indonesia, upaya untuk menghadapi berbagai strategi dan kebijakan Negara lain atas Indonesia menjadi penting untuk dipelajari dan menjadi bagian penting dari bangsa ini secara menyeluruh sadar akan hal tersebut. Salah satu pengikat utama yang perlu dikembangkan adalah adanya kepentingan bersama ("national interest"), yang terakumulasi dari berbagai kekayaan batin, kreativitas dan ideologi bangsa ini dan pandangannya pada dunia. Sekaligus tereksekusi menjadi berbagai aktivitas yang produktif dan strategis, yaitu upaya bersama untuk membangun "national building" sehingga memiliki posisi kuat di kancah global.

Integrasi kebijakan dan strategi menjadi penting terutama pada integrasi apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi bangsanya dan masyarakat madani yang memperkuat posisi "nation state", melalui berbagai kebijakan, aturan, program dan berbagai aktivitas yang produktif tersebut. Tentu saja aspek komunikasi menjadi hal yang penting.

Mengutip Marash (dalam Cambié and May Ooi, 2009 : 25) :
According to David Marash, US Anchor of Al Jazeera, 'when you formulate a position or design a campaign, you have to know that everyone in the world will be able to access that information. [These days] you can no longer get away with segmented messages. You are talking to the whole spectrum including consumers, competitors and adversaries. And it's a two-way communication. Their response is played back to you. Instead of trying to control the message, we have to communicate our passion and inspire the public so that they will spread the message for us. This is no easy task. It calls for a mind shift. But it also means a big step up the food chain for PR practitioners. Communication with the new general public requires intensive research into their cultural differences, beliefs, expectations and affiliations. We are talking about intelligence gathering here, not to be compared with old-style PR, which tended to be very much about writing news releases and compiling lists of press contacts. PR practitioners are no longer needed in their capacity as crafters of messages.

Pada intinya Cambié and May Ooi membahas dan menyoroti tentang peran PR yang berubah, untuk menjelaskan mengenai dampak pesan komunikasi dalam dunia yang sangat transparan. Lebih signifikan untuk mengkomunikasikan nilai daripada melakukan komunikasi yang searah/melakukan kontrol pesan. *Public Relations* (PR) disini tidak hanya diterjemahkan dalam konteks profesi saja, namun juga dalam konteks dan skala yang lebih makro.

Problem yang dihadapi Indonesia selain sebagian yang dipaparkan diatas, juga aspek kontra produktif, yaitu ketika melakukan komunikasi internasional secara massif, namun masih menghadapi problem domestic, termasuk media yang mengumbar kebobrokan publik (bedakan dengan kritisisme) dan justru melemahkan sisi positivism/spirit publik (terutama media yang dimiliki oleh kalangan politisi)

Dalam komunikasi dan ketahanan nasional, integrasi kebijakan, strategi dan sistem menjadi hal yang sangat penting. Selain perilaku Negara barat yang banyak dikaji, belajar dari Korea, Jepang, Singapore, China, India dan Malaysia, kita dapat melakukan komunikasi atas kepentingan nasional kita melalui jalur budaya, teknologi, ICT, media, ekonomi dan politik, termasuk aspek militer secara simultan.

Penutup

Mendiskusikan aspek komunikasi dan ketahanan nasional, dalam konteks Indonesia adalah hal yang serius untuk dikaji. Terutama jika dikaitkan dengan ancaman dan potensi ancaman yang di depan mata sebenarnya telah terjadi dan akan terus terjadi. Pada masa reformasi adalah sebenarnya titik lemah bangsa Indonesia secara ekonomi politik dan militer, akibatnya perpindahan kepemilikan dan aspek ancaman kedaulatan menjadi sangat riil di depan mata.

Potensi ancaman tidak hanya dalam konteks regional – bilateral, namun juga global. Perang dewasa ini sangat kompleks karena tidak terjadi pada saat perang (militer), namun setiap detik adalah perang, terutama karena factor ICT. Belum jika menyangkut hal yang lebih lunak, seperti produk-produk budaya, persepsi bahwa budaya luar lebih baik daripada dalam adalah potensi pelemahan ketahanan bangsa.

Belajar dari negara-negara barat, integrasi kebijakan, strategi, sistem dan terutama aspek komunikasi menjadi hal yang penting untuk dikembangkan di Indonesia, terutama karena kebiasaan buruk di lapangan, yaitu masalah koordinasi, sinkronisasi yang sering terjadi antar sektor dan justru melemahkan posisi Indonesia sendiri. Upaya untuk menguatkan positioning bangsa Indonesia adalah menegaskan kepentingan nasionalnya, sebagai kesatuan dari kebijakan dan eksekusi pemerintah/ Negara dan masyarakat madani untuk mencapai kemakmuran dan kejayaan bangsa.

Daftar Pustaka

- Bakrie, Rahakundini, 2012, Perang Modern dan Pengembangan Ketahanan Nasional, bahan presentasi Seminar dan Konferensi "Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional, 14 Juni 2012, UPN "Veteran" Yogyakarta
- Cambié, Silvia and May, Ooi-Yang, 2009 International communications strategy : developments in cross-cultural communication, PR, and social media. 1st ed, Kogan Page Limited London, Philadelphia
- Liao, Wei, 1999, Ways of Warriors Codes of Kings: Lessons in Leadership from the Chinese Classics, Translated by Thomas Cleary, Shambala Publications, Boston
- Jones, Andy; Kovacich, Gerald L; Luzwick, Perry G, 2002, Global information warfare : how businesses, governments, and others achieve objectives and attain competitive advantages, CRC Press LLC
- Tomes, Robert R. Tomes, 2007, US Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom Military innovation and the new American way of war, 1973–2003, Routledge New York, NY
- Zaharna, R. S, 2009, Battles to Bridges U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11, Kogan Page Limited
- Kompas, 23 Mei 2011
- <http://www.globalresearch.ca/the-post-war-ii-new-world-order-map-a-proposal-to-re-arrange-the-world-after-an-allied-victory/19706>, di akses 27 Februari 2013